

PEMBERDAYAAN INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM UPAYA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh : Ir. Tjuk Sukardiman, MSi

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan Orde Baru dilakukan berkat pendekatan Trilogi Pembangunan yang selama Pelita I dan Pelita II yang menekankan pada stabilitas, kemudian pada Pelita III dan Pelita IV pada pertumbuhan dan pada Pelita V dan Pelita VI penekanannya dengan meningkatkan pemerataan, hal ini telah terbukti selama lebih dari tiga dekade dalam kurun waktu PJP I dan Pelita VI telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dari tingkat pendapatan perkapita hanya sebesar US\$ 50 pada awal Orde Baru (1966) atau US\$ 70 pada awal Pelita 1 (1969) menjadi US\$ 1.200 pada pertengahan Pelita VI (1995).

Namun pada medio 1997 telah terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, dan bahkan krisis total pada awal 1998 tetap tidak direfleksikan ke dalam perumusan kebijakan nasional dalam Sidang Umum MPR-RI 1999. Kondisi tersebut telah memicu gejolak yang lebih besar menjadi tuntutan reformasi total di bidang politik, ekonomi dan hukum. Krisis tersebut bukan hanya diakibatkan oleh pengaruh eksternal dengan merosotnya nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN dan Asia Timur terhadap dollar AS, tetapi juga ditentukan oleh kondisi internal perekonomian Nasional Indonesia yang sangat rentan

terhadap gejolak menguatnya mata uang dollar AS yang terjadi. Hal ini diakibatkan karena rapuhnya struktur permodalan dalam perekonomian nasional yakni tingginya tingkat hutang, baik pemerintah maupun swasta. Kondisi tersebut telah dimungkinkan dengan berkembangnya penyelewengan moral (moral-hazard) dalam setiap transaksi perekonomian yang jauh dari suasana transparansi, akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat luas atau yang lebih terkenal dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dalam upaya mewujudkan terselenggaranya fungsi kontrol sosial yang lebih baik maka perlu dilakukan pemberdayaan

infrastruktur politik, di samping membenahi suprasruktur politik yang telah dilakukan. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat berlangsung justru dalam keadaan menghadapi krisis saat ini. Seandainya pemberdayaan infrastruktur politik telah berlangsung selama kurun waktu orde baru, secara hipotetis dapat diharapkan bahwa krisis total yang dialami bangsa Indonesia saat ini mungkin tidak akan berlangsung lebih parah dan memakan waktu lebih lama.

GAMBARAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

Walaupun parpol-parpol non komunis berperan aktif dalam



Tokoh-tokoh Nasional - Gambaran Menuju Indonesia Baru (Dok BB)

penumpasan G 30 S/PKI pada tahun 1965/1966 dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta penerapan sistem demokrasi Pancasila, tetapi peran dan fungsi parpol dalam proses politik pada dasarnya belum dapat dikatakan mengalami perbaikan, masih seperti masa sebelumnya, kemerosotan peran dan fungsi parpol pada masa Demokrasi Pancasila ada dasarnya disebabkan aktor eksternal dan sekaligus juga faktor internal sebagaimana menyitir uraian (M. Djadijono: 1995) maka paling tidak ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi kehidupan parpol dalam partai politik.

Faktor eksternalnya, seperti antara lain: *Pertama*, proses penyederhanaan kepartaian (Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966) yang merupakan himbauan Pemerintah Orde Baru dan bukan atas kehendak parpol itu sendiri sehingga

Pemerintah secara tidak langsung melibatkan diri dalam memilih pemimpin-pemimpin partai utama. *Kedua*, upaya Orde Baru dalam restrukturisasi lembaga-lembaga politik pada dasarnya dilatarbelakangi motivasi untuk menciptakan suasana akan kekuatan politik yang tergantung pada dan terkendali oleh pemerintah dengan cara melakukan intervensi agar parpol tetap dipimpin oleh orang-orang yang loyal kepada misi dan kepentingan birokrasi. *Ketiga*, jaringan hubungan antara elit partai dengan massa (khususnya PPP dan PDI) diputus melalui penerapan sistem massa mengambang, tetapi tidak kepada Golkar. Untuk mengimbangi pengaruh parpol, maka dibentuklah organisasi baru yang berafiliasi kepada Golkar dan organisasi-organisasi lain yang lazim disebut organisasi sosial masyarakat, profesi/fungsional (Orsosmasinal). *Keempat*, posisi yang makin menguat

dari kedua parpol (PPP dan PDI) dianggap sebagai ancaman berat apalagi setelah dua kali Pemilu PD menengalam peningkatan dalam perolehan suara (1987 dan 1992) perkembangan ini dihambat dengan dalih dan cara, salah satunya adalah bertukar hambatan gerakkan langkah parpol dalam kasus PD *Kelima*, dilakukannya politisasi birokrasi

yang sangat tinggi, yaitu penempatan pegawai negeri sebagai elemen pokok Golkar dan penempatan mereka dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR dan DPRD) dalam jumlah yang lebih banyak dari elemen-elemen lainnya serta penempatan aparatur pemerintah desa dan kecamatan sebagai aktifis Golkar ditambah kader-kader Golkar di pedesaan. *Keenam*, upaya untuk menjamin kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilu seperti diberita kepada pemilu bahwa menentang Golkar berarti menentang Pemerintah atau menentang bangsa dan karenanya tidak dapat pekerjaan atau pelayanan dari pemerintah.

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan merosotnya peran dan fungsi parpol di masa demokrasi Pancasila (Orde Baru) antara lain karena kehidupan partai politik sering diwarnai oleh konflik internal. Konflik dalam tubuh PPP terjadi

menjelang dan sesudah muktamar III tahun 1994 serta dalam pelaksanaan Musyawarah-musyawarah Wilayah dalam tahun 1995 (Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan Sumatera Utara) PDI pun dilanda konflik pada pra, selama pasca Kongres III (1986), Kongres IV (1993), KLB di Surabaya dan Munas di Jakarta (1993) sampai dengan pasca pelaksanaan Konferensi-konferensi Daerah PDI tahun 1994.

Infrastruktur politik yang terdiri dari orpol dan ormas dalam kehidupan Demokrasi Pancasila seharusnya dapat secara berkesinambungan digunakan untuk mengukur sejauh mana partisipasi dan kualitas politik rakyat. Demikian pula sebagai subyek pelaku demokrasi, peranan orpol dan ormas seharusnya secara transparan dapat dilihat kehidupan/dinamika politiknya dari satu Pemilu sampai kepada Pemilu berikutnya melalui pengekspre-sian program-programnya. Kedudukan infrastruktur politik ini semakin signifikan manakala mereka dapat meng-artikulasikan dan mengag-regasikan kepentingan politiknya yang berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya maupun kepentingan nasional yang sesuai dengan tuntutan sistem politik Demokrasi Pancasila.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No. 8 tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi infrastruktur politik sudah

seharusnya mampu berkembang makin mantap dan dapat melaksanakan tugasnya secara lebih teratur, namun kenyataannya tidak demikian.

Mekanisme politik yang dimaksud dalam sistem politik Indonesia adalah mekanisme hubungan antar lembaga dalam suprastruktur, di dalam infrastruktur dan hubungan antar supra dan infrastruktur politik yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dalam tatanan Demokrasi Pancasila.

Tata hubungan yang ada cukup fleksibel yang mengandung nilai kebersamaan dengan mengutamakan kepentingan rakyat/nasional serta mampu berperan secara aktif berdasarkan nilai dan norma politik Pancasila, namun pada kenyataannya mekanisme ini sering terdistorsi oleh kepentingan kekuatan tertentu, sehingga belum berlangsung secara efektif untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada sisi lain, keadaan sosial ekonomi masyarakat dijadikan alasan untuk menjauhkan masyarakat dari politik agar mereka dapat memberi perhatian utama pada peningkatan kesejahteraannya. Dengan kata lain, masyarakat lebih didorong untuk berperan sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan daripada sebagai partisipan aktif dalam proses politik nasional.

Selanjutnya demi stabilitas politik guna perbaikan mutu kehidupan sosial ekonomi masyarakat, hasil lainnya dari pengorbanan demokrasi adalah pemerintah menjadi suatu kekuatan "hegemonik" yang

mendominasi hampir setiap aspek dan segi kehidupan masyarakat.

Pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat memang telah dapat dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali selama Orde Baru, namun pemilu maknanya hanya sebagai pemenuhan formal agenda nasional, dan bukan sebagai perwujudan hak politik warga negara.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan Lingkungan Strategis akan ditinjau dari tingkat pengaruh secara internasional, regional dan nasional terhadap Ketahanan Nasional dengan menggunakan instrumen *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Perkembangan Lingkungan Strategis Internasional

Dalam mengukur tingkat pengaruh faktor lingkungan strategis secara internasional terhadap Ketahanan nasional akan dilihat terhadap isu yang sedang berkembang di dunia internasional, yaitu masalah HAM, pelaksanaan demokrasi dan liberalisasi dalam perdagangan.

Sedangkan Konsep dasar Tannas dalam kehidupan nasional meliputi 8 aspek yang meliputi :

- 1) Tri Gatra : yang melekat pada negara meliputi geografi, kekayaan alam dan kependudukan

2) Panca Gatra : aspek yang termasuk dalam Panca Gatra meliputi aspek-aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM

3) Faktor yang diangkat sebagai faktor yang mempengaruhi Tannas adalah HAM, Demokrasi dan Liberalisasi.

Setelah dilakukan identifikasi variabel, maka sebagai langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penyusunan struktur hirarki permasalahan.

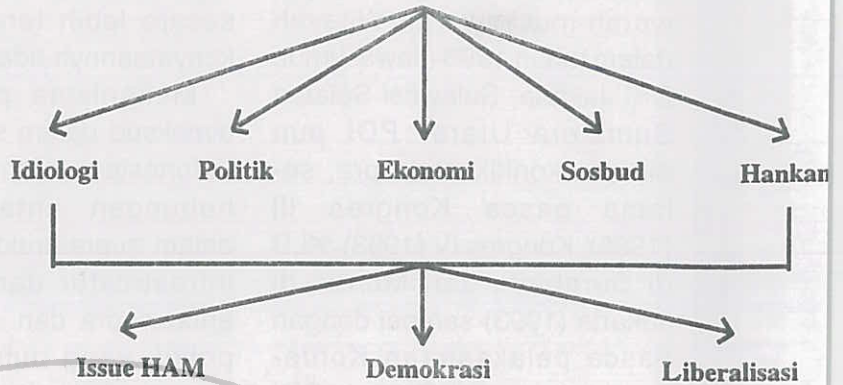
Selanjutnya dilakukan penilaian faktor-faktor pengaruh tersebut terhadap Panca Gatra dengan menggunakan instrumen *Analytical hierarchy Process* dan hasilnya sebagai berikut :

Terlihat dari tabel di atas, parameter politik dan ekonomi sangat sensitif terhadap faktor lingkungan strategis internasional yaitu isu HAM dan demokrasi, sehingga perlu upaya pembenahan pada parameter tersebut.

Perkembangan Regional

Dalam analisis pengaruh Perkembangan Regional terhadap Ketahanan Nasional akan dilihat kondisi dari Tannas dalam menghadapi isu yang sedang berkembang sekarang ini di wilayah regional khususnya kawasan ASEAN, yaitu masalah liberalisasi dan semangat kerjasama Variabel yang diangkat sebagai faktor pengaruh adalah liberalisasi dan semangat kerjasama. Berdasarkan faktor-faktor pengaruh

Ketahanan Nasional Terhadap Lingstra Secara Internasional



Panca Gatra	Issue HAM	Demokrasi	Liberalisasi	Jumlah	Ranking
Ideologi	0.19	0.19	0.14	0.15	3
Politik	0.46	0.35	0.40	1.21	1
Ekonomi	0.11	0.19	0.24	0.54	2
Sosbud	0.07	0.07	0.08	0.22	4
Hankam	0.19	0.19	0.14	0.51	3

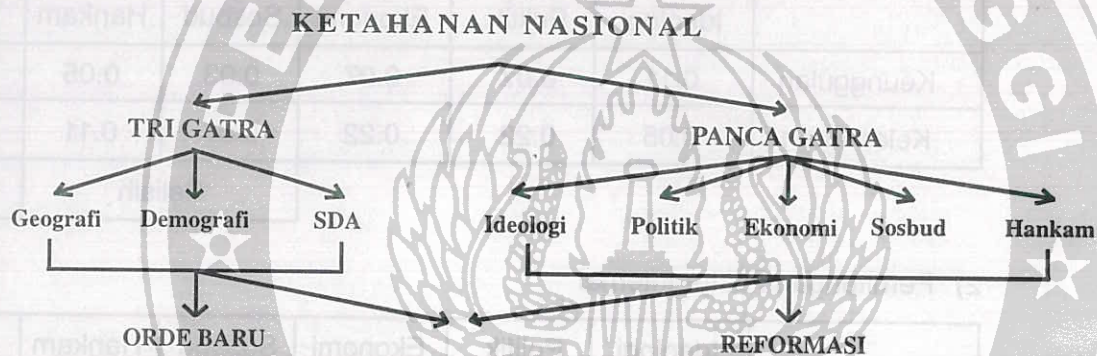
tersebut, maka besaran nilai pengaruh terhadap Panca Gatra adalah sebagai berikut :

Panca Gatra	Liberalisasi	Kerjasama	Jumlah	Ranking
Ideologi	0.14	0.19	0.33	3
Politik	0.40	0.35	0.76	1
Ekonomi	0.24	0.19	0.44	2
Sosbud	0.08	0.07	0.15	4
Hankam	0.14	0.19	0.33	3

Dari tabel di atas terlihat parameter politik memiliki nilai tertinggi dilihat dari Lingkungan Strategis regional, hal ini mengandung konsekuensi logis karena masih adanya beberapa konflik antara negara ASEAN

Perkembangan Nasional

Dalam analisis Profil Pertahanan Nasional akan dilihat kondisi Tannas pada era Orde Baru maupun pada era Reformasi. Sebelum melakukan penilaian maka disusun struktur hirarki permasalahan sebagai berikut :



Hasil perhitungan pembobotan berdasarkan dari hasil penilaian tingkat pengaruh di atas adalah sebagai berikut :

UNSUR TANNAS		BOBOT		PERUBAHAN DARI ORBA KE REFORMASI
		ORBA	REFORMASI	
TRI GATRA	GEOGRAFI	0.50	0.50	0
	DEMOGRAFI	0.50	0.50	0
	SKA	0.50	0.50	0
PANCA GATRA	IDEOLOGI	0.440	0.560	+ 0.120
	POLITIK	0.640	0.360	- 0.280
	EKONOMI	0.783	0.217	- 0.566
	SOSBUD	0.560	0.440	- 0.120
	HANKAM	0.568	0.432	- 0.136

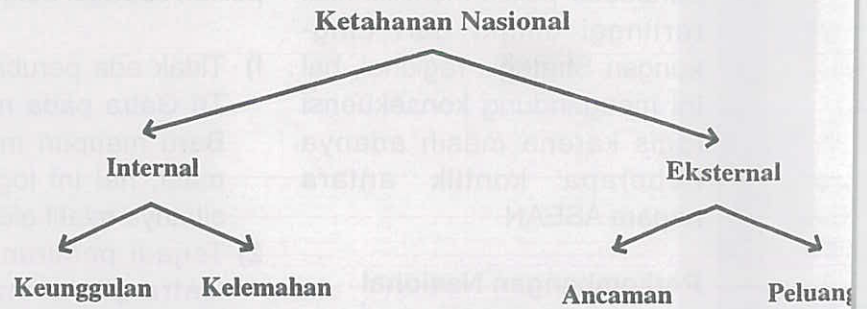
Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Tidak ada perubahan pada Tri Gatra pada masa Orde Baru maupun masa reformasi, hal ini logis karena sifatnya relatif alamiah.
- 2) Terjadi penurunan Panca Gatra pada masa Orde Baru 0,655 menjadi 0,335 pada Orde Reformasi, hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada parameter Politik dan Ekonomi.
- 3) Secara totalitas (Astra Gatra) telah terjadi penu-

runan Ketahanan Nasional dari masa Orde Baru (0,57) menjadi 0,43 pada masa Orde Reformasi, sehingga kondisi Tannas pada era Orde Baru ternyata relatif lebih baik dibandingkan dalam era Reformasi.

Analisis ATHG Ketahanan Nasional

Dalam melakukan analisis ATHG akan ditinjau pada keseluruhan aspek Astagatra terhadap faktor lingkungan strategis bersifat internal maupun eksternal. Struktur Analisis ATHG adalah sebagai berikut :



Dari hasil penilaian dapat digambarkan bahwa posisi Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut :

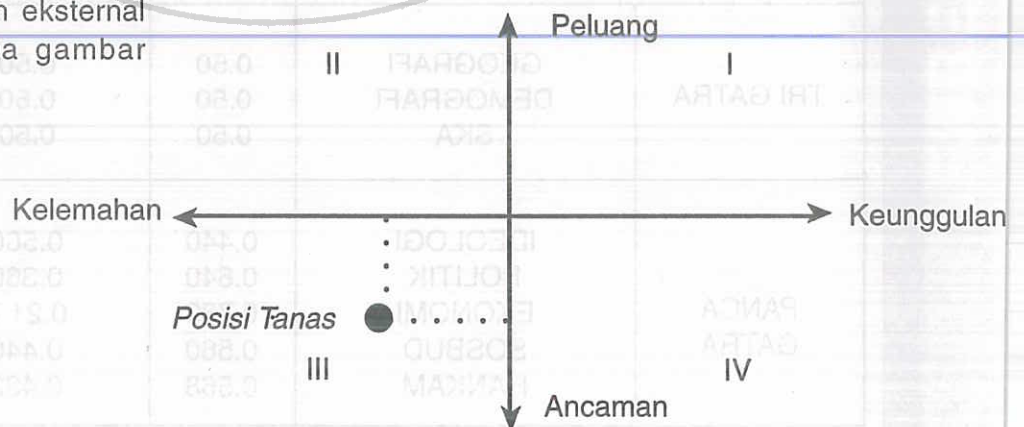
1) Perhitungan Faktor Internal

	Ideologi	Politik	Ekonomi	Sosbud	Hankam	Bobot
Keunggulan	0.11	0.07	0.07	0.03	0.05	0.34
Kelemahan	0.05	0.22	0.22	0.06	0.11	0.66
Selisih						- 0.33

2) Perhitungan Faktor Eksternal

	Ideologi	Politik	Ekonomi	Sosbud	Hankam	Bobot
Ancaman	0.11	0.24	0.24	0.04	0.11	- 0.72
Peluang	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0.28
Selisih						- 0.43

Dalam analisis ATHG, maka posisi Tannas apabila dilihat dari faktor lingkungan strategis secara internal dan eksternal dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Dari hasil perhitungan analisis ATHG ternyata posisi Tannas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis secara internal dan eksternal berada pada posisi kwadran ke III yang berarti kondisi Tannas dalam kondisi Survival.

PERAN SISMENNAS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK

SISMENNAS merupakan suatu sistem dimana manajemen adalah merupakan faktor upaya, yang menggunakan organisasi sebagai faktor sarana, serta administrasi sebagai faktor karsa yang memberi arah dan paduan dalam merumuskan, mengendalikan pelaksanaan, dan mengawasi serta menilai hasil pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur utama SISMENNAS dalam bidang ketatanegaraan meliputi : (1) negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka usaha mewujudkan cita-cita bangsa; (2) bangsa Indonesia sebagai unsur "pemilik-negara" berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/haluan kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedo-

man bagi penyusunan penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, (3) pemerintah sebagai unsur "manajer dan penguasa", berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsadan kelangsunganserta pertumbuhan negara; dan (4) masyarakat adalah unsur "penunjang dan pemakai" yang berperan baik sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.

Sejalan dengan pokok pikiran tersebut di atas, maka dilihat secara struktural unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut tersusun atas empat tatanan (*setting*) yang dilihat dari dalam ke luar adalah sebagai berikut: (1) Tata laksana Pemerintahan (TLP); (2) Tata Administrasi Negara (TAN); (3) Tata Politik Nasional (TPN); (4) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM).

TLP dan TAN merupakan "tatanan dalam (*inner setting*)" SISMENNAS dimana proses manajemennya sendiri berpangkal TPN dan TIM merupakan "tatanan luar (*outer setting*)" SISMENNAS, yang merupakan faktor lingkungan sebagai sumber aspirasi dan kepentingan rakyat serta sumber kepemimpinan nasional maupun sebagai penerima hasil-hasil keluaran SISMENNAS.

Secara proses SISMENNAS berpusat kepada suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan, yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP sehingga merupakan suatu tatanan yang dapat disebut Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB).

Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses arus keluar dan selanjutnya disalurkan ke TPN dan TKM. Arus keluar ini pada dasarnya merupakan tang



Gedung ASTA GATRA, wahana pengembangan calon pemimpin bangsa (Dok. Lemhannas)

gapan Pemerintah terhadap berbagai tuntutan, tantangan serta peluang bagi lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa berbentuk (hirarki) perundangan peraturan tertentu, sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijaksanaan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkannya. Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), yang merupakan inti SISMENNAS ter selenggara fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasayarakatan ataupun kebangsaan yang bersifat politis, kedalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaannya serta meningkatkan daya guna dan hasil gunanya, yang meliputi hasil perencanaan, pengendalian dan penilaian.

Pada aspek Arus Keluar maka secara fungsional SISMENNAS diharapkan untuk menghasilkan :

- a. Aturan, norma, patokan, pedoman dan lain sebagainya yang secara singkat dapat disebut Kebijakan publik (Public Policis);
- b. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, ataupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang ber lazim dijabarkan dalam sejumlah program dan berbagai kegiatan;

- c. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan, penerapan, penegakan dan penyelenggaraan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

pada tahap TKM, memerlukan pengolahan pada tahap yang lebih tinggi untuk memperoleh keputusan atau per mufakatan. Maka oleh karena itu harus dijadikan masukan bagi tahap Tata Politik Nasional (TPN). Pada tahap TPN ini kepentingan masyarakat itu tersaring dan terolah oleh perpaduan dengan nilai-nilai kebangsaan sehingga sifatnya



Infrastruktur yang tidak tepat menimbulkan dampak lingkungan (Foto Istimewa).

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

POSISI DAN PERANAN INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM SISMENNAS

Struktur

Tata kehidupan dalam SISMENNAS di mulai dari Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) sampai Tata Laksana Pemerintahan (TLP) mengatur kepentingan masyarakat (*societal interest*) dalam mewujudkan cita-cita rakyat menuju tata kehidup masyarakat yang ideal.

Keperentingan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi

berubah menjadi kepentingan nasional. Pada tahap TPN ada dua kelompok kelembagaan yang merupakan sarana utama bagi terwujudnya dan ter selenggaranya kepemimpinan nasional yaitu kelembagaan kepartaian politik dan kelembagaan organisasi massa, media massa dan lain sebagainya.

Permasalahan yang timbul dalam TKM ini diantaranya yaitu aspirasi yang bersumber dari TKM tidak mendapat saluran yang wajar sebagai arus masuk baik ke struktur di atasnya yaitu TPN atau k

TAN/TLP akibat adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antar pemimpin LSM dan orsospol dengan kesenjangan yang terjadi antar pemimpin LSM dan orsospol dengan masyarakat, dan lemahnya kelembagaan Ormas yang ada. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan TKM dalam merumuskan aspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Budaya komunikasi politik yang memakai model top-down tidak bersumber pada aspirasi masyarakat dalam TKM dan berakhir buruk pada pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan atau krisis kepercayaan serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam peranannya arus masuk ke TPN maupun TAN/TLP.

Tatanan Pengambilan keputusan Berkewenangan memerlukan berbagai masukan yang bersifat

kepentingan masyarakat dan bangsa untuk di olah. menjadi alternatif-alternatif, yang harus dipilih dan diputuskan sebagai kebijaksanaan umum maupun program nasional TPKB memerlukan orang-orang yang berwibawa dan mendapat kepercayaan dari rakyat.

Fungsi

Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemasyarakatan politik, yang berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diartikan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Pada pembahasan ini penjaminan hak rakyat pada pokoknya berupa terpenuhinya berbagai kepentingan. Pada proses arus masuk terdapat dua fungsi yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan. Fungsi pengenalan dalam rangka kehidupan kenegaraan Kelembagaan

Negara yang suatu bangsa diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan dan kejelasan tentang segala sesuatu yang diperlukan atau yang dirasakan oleh seluruh rakyat pada tatanan TKM, TPN dan TPKB.

Fungsi TKM meneruskan aspirasi masyarakat yang tumbuh di tatanan ini melalui partai politik atau organisasi masyarakat. Keinginan rakyat yang mendambakan kehidupan yang ideal disalurkan melalui sarana sesuai pola sosial budaya dengan unsur falsafah hidup, lingkungan fisik dan cara hidup

Fungsi TPN harus menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan keputusan politik untuk seterusnya untuk diperjuangkan sebagai masukan pada TPKB dan memasyarakatkan keputusan-keputusan dari TPKB kepada masyarakat.

Fungsi TPKB dan TAN harus mampu mentransformasikan masukan-masukan politik dari TPN menjadi kepentingan negara/masyarakat dan di transformasikan menjadi suatu kepentingan umum. Pembentukan penyelenggaraan Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan adalah masukan hasrat dari masyarakat agar mampu membuat program-program sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena negara RI ini meru-



Demo di Ambon (Dok.BB) (Foto Istimewa)

pakan negara kebangsaan dan kedaulatannya ada di tangan rakyat.

Sebagai faktor sarana Kelembagaan Negara yang merupakan penjelmaan kedaulatan Rakyat, aparatur negara harus mampu menyuarkan kepentingan masyarakat dan aparatur negara sebagai birokras juga harus mampu menjalankan mekanisme pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Dengan demikian ormas melalui pengaruhnya dapat ikut mengarahkan kebijakan publik guna mencapai sasaran yang diinginkan serta menguntungkan. Sasarannya antara lain adalah agar kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi kelompok yang tertinggal dan terbelakang dan memberikan ruang kepada peran serta masyarakat dalam program pembangunan. Dorongan lain untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik adalah kesadaran ormas sendiri bahwa usaha pembangunan berskala kecil yang mereka lakukan akan gagal kalau tidak didukung oleh kondisi-kondisi makro.

Tuntutan terhadap kebijakan pemerintah akan terpenuhi jika ormas mempunyai pengaruh yang kuat didalam proses pembuatan kebijakan publik. Derajat pengaruh ormas terhadap perumusan kebijakan akan tergantung pada beberapa hal diantaranya adalah jenis, macam maupun tingkat kebijakan, akses kepada pembuat kebijakan, derajat konflik yang mungkin timbul,

strategi yang digunakan serta sumber daya yang dimiliki.

Kompleksitas hubungan dengan pemerintah serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan bentuk strategi menjadikan upaya ormas untuk berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik sebagai sesuatu yang tidak mudah.

Ormas sebagai organisasi independen seharusnya dapat ikut mengarahkan (mengoreksi) kebijakan publik untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi dimaksud yang beranggotakan kelompok masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, karena selama ini ormas tidak mampu menjalankan fungsinya di dalam menjembatani kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Di dalam kehidupan sosial politik, pemerintah terlalu banyak campur tangan dan ini menunjukkan lemahnya peranan dan fungsi orsospol maupun ormas.

PEMBERDAYAAN INFRA-STRUKTUR POLITIK

Penyampaian aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan dapat merupakan spektrum yang negatif dalam sikap dan tindak yang tidak loyal, tidak taat dan tidak disiplin bahkan dalam wujud demonstrasi, oposisi, perlawanan dan pemberontakan yang dapat memperburuk keadaan krisis nasional. Tidak tersalurnya aspirasi masyarakat pada

TKM dapat disebabkan karena masyarakat tidak tahu atau tidak bisa mengidentifikasi kepentingannya, tidak bisa menyalurkannya yaitu tidak tahu parpol mana yang bisa menyalurkannya atau tidak mau menyalurkan aspirasinya. Pada TPN tidak tersalurnya aspirasi masyarakat bisa juga terjadi karena TPN, antara lain parpol, ormas, dalam situasi dan kondisi tidak tahu, tidak mampu atau tidak mau untuk mengartikulasikan dan menyalurkan aspirasi tersebut.

Aspirasi rakyat dalam fungsi pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan keduanya menjadikan pendapa umum pada Tata Politik Nasional (TPN). Pemasyarakat politik diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban dan hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya dalam peran politik melalui lembaga partai politik, organisasi massa dan media massa berfungsi sebagai pengamat.

Kenyataan menunjukkan selama ini bahwa begitu dominannya pemerintah (TA dan TLP) sebagai pelaksananya kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, sehingga mematikan aspirasi murni dari masyarakat. Aspirasi tersebut tidak diolah dan dituangkan menjadi kebijakan publik oleh suprastruktur bahkan sebaliknya kadang-kadang pihak pemerintah mendiskreditkan begitu saja dengan argumen yang kurang tepat. Kondisi yang demikian ini menyebabkan rakyat menjadi apatis. Hal yang demikian ini memberi

dikasi bahwa aspirasi masyarakat tersumbat pada TKM karena adanya kepanjangan tangan dari pemerintah (TAN dan TLP) sampai ke TKM dalam arti yang negatif.

Golkar begitu dominan dan besar pengaruhnya pada pemerintah dan sebaliknya, menyebabkan adanya penekanan terhadap parpol yang ada. Pada kondisi seperti ini korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang secara subur pada TPN sehingga aspirasi masyarakat tidak ditanggapi bahkan tidak dihiraukan. Mengenai rekrutmen atau pemilihan kepemimpinan, justru terjadi kolusi dan nepotisme dimana jelas terlihat bahwa "AMPI" (Anak, Menantu, Ponakan dan Isterinya) muncul pada keanggotaan DPR/MPR, pada anggota MPR yang diangkat lebih banyak daripada yang dipilih, semua Menteri, Gubernur, semuanya otomatis menjadi anggota MPR. Hal yang demikian inilah yang menunjukkan bahwa bukan lagi aspirasi masyarakat banyak yang disalurkan, tetapi kepentingan kelompok elit yang mengatasnamakan kepentingan masyarakatlah yang disalurkan. Dari beberapa contoh tersebut di atas inilah yang terkulminasi dan menjadi salah satu penyebab bagi terjadinya krisis nasional.

Kemampuan, kualitas dan kemandirian organisasi sosial politik organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan politik perlu terus dimantapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan menjalankan peranannya sebagai penampung dan pe-

nyalurkan aspirasi rakyat secara lebih berkualitas dan bertanggung jawab dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu langkah pemberdayaan infrastruktur politik harus dilakukan, meliputi langkah-langkah restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi agar mekanisme politik atau mekanisme hubungan antara lembaga di dalam suprastruktur dan infrastruktur dan hubungan antara supra dan infrastruktur politik dijiwai dengan semangat kekeluargaan dalam tatanan Demokrasi Pancasila.

KESIMPULAN

- a. Keberhasilan pembangunan telah berpengaruh secara struktural dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial budaya. Jumlah masyarakat miskin pada awal Pelita VI dapat ditekan hingga menjadi 15%, sedangkan awalnya mencapai 35%. Golongan masyarakat bermasyarakat berpenghasilan menengah ke atas telah mencapai 20% dimana pada awalnya (Pelita 1) hanya 2%. Tingkat kesadaran politik masyarakat makin tinggi selaras dengan jumlah perkembangan masyarakat terdidik.
- b. Kondisi sosial politik yang menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan Nasional Indonesia pada saat ini disamping memiliki dimensi ekonomi juga memiliki dimensi politik, sosial keamanan dan budaya yang menumbuhkan dan menun-

jang berkembangnya kondisi yang stabil dan dinamis. Pembangunan sosial ekonomi berjalan secara simultan serta berkaitan dengan pembangunan di bidang sosial, politik, keamanan dan budaya. Dengan demikian terjadi suatu hubungan antara kehidupan sosial ekonomi dengan sosial politik, sosial budaya, dan keamanan yang pada dasarnya saling menghidupi dan melengkapi.

- c. Kondisi ini terus berjalan hingga medio 1997, namun, di saat itu juga terjadi krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi bahkan mencapai krisis total, sehingga berpengaruh negatif secara struktural dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan nasional.
- d. Atas dasar tersebut di atas, maka perlu upaya-upaya secara menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dalam hal ini konsep Ketahanan Nasional meliputi 8 aspek (Astagatra) meliputi Trigatra yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, dan Pancagatra yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam. Disamping faktor-faktor lingkungan strategis dari dalam, faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi isu HAM, Demokrasi dan Liberalisasi.
- e. Telah terjadi kemunduran

peran dan fungsi infrastruktur politik yang disebabkan oleh: (1) Implementasi sistem politik Indonesia yang selama ini dilaksanakan kurang mencerminkan Demokrasi Pancasila yang dijiwai oleh kelima silanya dan ternyata banyak penyimpangan terjadi yang justru menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar; (2) Pada saat sebelum dan masuk ke dalam era reformasi ini, terlihat bahwa aspirasi rakyat sebagai cerminan Demokrasi Pancasila belum mendapat tempat yang luas dalam sistem politik Indonesia.

SARAN

Beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan infrastruktur politik dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional adalah:

a. Menciptakan sistem politik yang lebih terbuka yang

ditandai dengan semakin tingginya loyalitas dan dedikasi rakyat terhadap sistem politik yang berlaku. Semakin akomodatifnya sistem itu terhadap tuntutan dan aspirasi yang datang dari rakyat, pada gilirannya akan menghilangkan akar-akar kecurigaan seiring semakin kokohnya semangat persatuan, kerjasama, solidaritas dan tanggung jawab di berbagai iklim hubungan politik yang mendorong kekuatan sosial politik untuk bersaing secara sehat dalam upaya bersama mengamalkan Pancasila.

b. Pemberdayaan infrastruktur politik

Pemberdayaan infrastruktur politik melalui reformasi (perubahan) pada sistem politik Indonesia yang sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila, terutama pada struktur, mekanisme, budaya serta partisipasi dan komunikasi.

c. Memperkuat peranan ke-

mitraan suprastruktur politik yang mendukung pemberdayaan infrastruktur politik melalui peningkatan perannya dalam arti sistem politik dan mekanisme pemerintahan yang dapat memenuhi fungsinya, untuk terwujudnya *good governance* yaitu dengan menyelesaikan ketegangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu mencapai tujuan nasional dan mampu berperan sebagai sarana integrasi nasional.

d. Melakukan reformasi bidang politik di samping ekonomi dan hukum yang sesuai dengan aspirasi rakyat, sebagai langkah tanggap terhadap proses menuju kultur era reformasi khususnya pada tingkat suprastruktur, agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar di dalam mencapai tujuan nasional sekaligus sebagai langkah menjalankan pembangunan dengan menjalankan sistem Demokrasi Pancasila

Ir. Tjuk Sukardiman, Msi Alumnus KRA XXXI Lemhanas

DAFTAR PUSTAKA 1

- Babari J., 1995, **Agenda Politik Kenegaraan RI Lima Tahunan**, CSIS, Jakarta
- Barry, P Norman, 1989, **Unintroduction to Modern Political Theory**, London Mac Millan Ltd.
- Djopari, JR Gerson, Drs. MA, 1997, **Sistem Politik di Indonesia**, Yayasan Karya Dharma IIP Depdagri Jakarta
- Dodd, CH, 1972, **Political Development**, London Mac Millan Ltd.
- Eksekutif, Juli, 1996, **Negara Berkembang di Tengah Gejolak Ekonomi Dunia**, Dipetik dari Didik J. Rachbini. M. Nawir Messi dan Faisal H. Basri dalam Panel Diskusi Jurusan Ilmu Politik Fisip UI
- Feith, Herberrrt and Lance Casttles 1988, **Pemikiran Politik Indonesia : 1945 -1965**, LP3ES, Jakarta
- Gadjah Mada University Press, 1992, **Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemoni Party System**, Yogyakarta.
- Guna, Ucu Aditya, **Beberapa Aspek Reformasi Perekonomian Nasional**, Telstra No 51 Maret - April 1998
- Hatta, Moch., 1960, **Demokrasi Kita**, Jakarta, Pustaka Antara
- Held, David, 1990, **Models ot Democracy**, Cambridge Press
- Ingleson, John, 1993, **Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan (Terjemahan)**, Jakarta : Pustaka Grafiti
- Legowo Tommi 1994 **Demokratisasi : Refleksi Kekuasaan Yang Transformatif, Dalam Analisis (1)**, CSIS Jakarta
- Lemhannas, **Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS)**
- Liddle, R. William 1992, **Partisipasi dan Peran Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Lijphard Arend, 1984, **Democracies Pattern of Majoritarian and Concencuss Government in Twenty One Countries**, Yale University Press
- Lubis, Mulya T. 1994 **Rule of Law, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia : Agenda Masa Depan**, Makalah untuk Sarasehan Kebudayaan Taman Siswa VIII, Yogyakarta, 29 - 30 Maret
- M. Djadijono, 1995, **Peran Partai Politik di Indonesia : Dahulu dan Sekarang, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia**, CSIS Jakarta

- Margono, 1971, **Ichtisar Sedjarah Pergerakan Nasional (1908 - 1945)**, Djakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI
- Notosusanto, Nugroho 1985, **Tercapainya Konsensus Nasional 1966 - 1969**, Balai Pustaka, Jakarta
- Onny, S Priyono, 1995, **Peran Organisasi Nirlaba, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Serta Pola Interaksi dengan Pemerintah** CSIS, Jakarta
- Pangestu, M., 1993, **The Role of State and Economic Development in Indonesia**, In The Indonesian Quarterly 21, no 3 : 253 - 283
- Rufiness Lahur, 1995, **Keterbukaan Politik, Kepemimpinan dan Ketidakpastian**, CSIS, Jakarta
- Siagian, Faisal, 1994, **Menangkap Peluang Demokrasi di Indonesia**, Analisis CSIS, Jakarta
- Silalahi, Harry Tjan, 1990, **Konsensus Politik Nasional Orde Baru**, CSIS Jakarta
- Sudibyo, M., 1984, **Tiga Tahap Dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia Dalam Analisis (8)**, CSIS, Jakarta
- Syahriir, 1986, **Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok**, L P3ES, Jakarta
- TA., Legowo, 1995, **Dinamika Demokratisasi di Indonesia**, CSIS, Jakarta
- UNDP Human, 1993, **Development Report**, New York
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1993, **What Price Freedom**, Jakarta

